BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

4.1.1 Kondisi Geografis

Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi ini. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai, sehingga terkenal dengan kota delta. Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan kota Surabaya merupakan pintu gerbang ke Kota Surabaya yang dihubungkan dengan jalan raya kelas 1, merupakan peluang yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah. Dikatakan sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Surabaya karena kabupaten-kabupaten di sekitarnya, khususnya Kabupaten Mojokerto, Malang, dan Pasuruan apabila akan melakukan hubungan dengan Surabaya harus melewati Kabupaten Sidoarjo. Keadaan ini akan memberikan peluang besar bagi Kabupaten Sidoarjo untuk maju karena mampu menarik manfaat dengan mengandalkan hubungan melalui peningkatan aksesbilitas yang didukung oleh sarana dan prasarana, transportasi, dan komunikasi.

Secara astronomi, Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5° sampai 112,9° Bujur Timur dan 7,3 ° sampai 7,5° Lintang Selatan. Luas wilayahnya 71.424,25 Ha. Batas-batas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gersik
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Sidoarjo termasuk salah satu kota dalam konsep pengembangan Gerbangkertasusila, yakni Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kawasan Gerbangkertasusila merupakan salah satu strategi dan kebijaksanaan pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mempercepat proses pembangunan dalam segala bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Secara administratif, Sidoarjo termasuk daerah yang berbentuk Kabupaten, yang dikepalai oleh Bupati yang sekaligus juga menjabat sebagai kepela emerintahan. H. Saiful Ilah, SH, M.Hum adalah Bupati Sidoarjo periode 2010-1014. Kabupaten Sidoarjo terbagi ke dalam 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Data tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo

NO	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Sidoarjo	10	14
2	Buduran	15	-
3	Candi	24	-
4	Porong	13	6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Krembung	19	-
6	Tulangan	22	-
7	Tanggulangin	19	-
8	Jabon	15	-
9	Krian	19	3
10	Balongbendo	20	-
11	Wonoayu	23	-
12	Tarik	20	-
13	Prambon	20	-
14	Taman	16	8
15	Waru	17	-
16	Gedangan	15	-
17	Sedati	16	-
18	Sidoarjo	19	-
	Jumlah	**322**	**31**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2011

Kabupaten Sidoarjo yang terletak di tepi Selat Madura dan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.Terletak di antara 112,5-112,9 derajat bujur timur dan 7,3-7,5 derajat lintang selatan dengan luas 71,424,25 hektar. 40,81 persen terletak pada ketinggian 3-10 meter di atas permukaan laut yang berada di bagian tengah dan dengan kondisi air yang tawar. 29,99 persen berada pada ketinggian 0-3 meter diatas permukaan air laut berada di sebelah timur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan daerah pantai dan daerah tambak. Serta 29,20 persen terletak diketinggian 10-25 meter di atas permukaan air laut berada di bagian barat.

Wilayah Sidoarjo dikenal dengan pintu gerbang Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Karena hampir semua masyarakat di pulau Jawa yang akan memasuki Kota Surabaya pasti akan terlebih dahulu masuk atau melewati wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki dua jalur utama yaitu jalan dengan tujuan Surabaya-Pasuruan dan jalan dengan tujuan Surabaya-Mojokerto. Jalan tersebut adalah merupakan gerbang untuk masuk atau pun keluar menuju kota maupun kabupaten yang ada di pulau jawa. Sehingga jalan tersebut merupakan jalur utama yang memberikan pengaruh yang sangat berperan penting. Peran terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi baik barang dan jasa di wilayah Jawa maupun daerah di luar Jawa. Selain itu Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan wilayah yang menjadi penyangga Kota Surabaya, karena potensi wilayah yang sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian khususnya di Jawa Timur.

Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang sangat cepat yang dialami oleh Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan Kota Surabaya yang juga merupakan salah satu kota pelabuhan yang sangat sibuk di Indonesia selain sebagai kota industri tentunya. Ini menyebabkan Kota Surabaya mengalami ledakan penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat tinggi tiap tahunnya. Karena terjadi Urbanisasi besar-besaran untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik di Kota Surabaya. Namun dengan semakin banyaknya pertumbuhan industri dan penduduk di Kota Surabaya. Menjadikan pembangunan kawasan industri dialihkan di kawasan sekitarnya, salah satunya Kabupaten Sidoarjo yang juga mengalami imbasnya. Hal tersebut di barengi dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang juga mengalami peningkatan tajam tiap tahunnya. Baik yang hanya berdomisili karena bekerja di Kota Surabaya, maupun yang berdomisisli dan bekerja di Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan arah pembangunan tersebut berakibat pada semakin kaburnya batas antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Terlebih dengan dibangunnya jalan tol Surabaya-Pasuruan yang telah juga memacu perkembangan pembangunan hingga mencapai wilayah paling selatan Kabupaten Sidoarjo. Yaitu Kecamatan Candi, Tanggulangin, hingga ke arah Porong yang berjarak ± 30 kilometer dari batas Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga banyak dari kawasan tersebut sekarang dipadati oleh banyak pabrik, pertokoan, perumahan, dan kawasan ekonomi lainnya.

Perkembangan arah pembangunan tersebut berakibat pada semakin kaburnya batas antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Terlebih dengan dibangunnya jalan tol Surabaya-Pasuruan yang telah juga memacu perkembangan pembangunan hingga mencapai wilayah paling selatan Kabupaten Sidoarjo. Yaitu Kecamatan Candi, Tanggulangin, hingga ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arah Porong yang berjarak ± 30 kilometer dari batas Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga banyak dari kawasan tersebut sekarang dipadati oleh banyak pabrik, pertokoan, perumahan, dan kawasan ekonomi lainnya.

Tabel
Komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2010

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sidoarjo	95.885	98.166	194.051
2	Buduran	46.901	45.433	92.334
3	Candi	72.283	72.863	145.146
4	Porong	33.771	32.138	65.909
5	Krembung	29.183	29.175	58.358
6	Tulangan	43.982	43.440	87.442
7	Tanggulangin	42.279	42.301	84.580
8	Jabon	24.996	25.023	49.989
9	Krian	59.899	58.786	118.685
10	Balongbendo	33.633	33.232	66.865
11	Wonoayu	36.017	35.992	72.009
12	Tarik	30.615	30.362	60.977
13	Prambon	34.273	34.063	68.336
14	Taman	107.256	105.601	212.857
15	Waru	116.242	115.056	231.298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16	Gedangan	67.757	65.090	132.847
17	Sedati	46.805	45.663	92.468
18	Sukodono	55.936	55.185	111.121
	Jumlah	**977.683**	**967.569**	**1.945.252**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2011

1.1.1.2 Aspek Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan. Efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pembangunan diharapkan menjadi optimal jika dilaksanakan oleh kumpulan SDM berkualitas.Indikator kualitas SDM yang paling umum digunakan karena lebih mudah untuk mendapatkan informasi atau datanya adalah pendidikan formal.Prosentase penduduk yang berpendidikan adalah 40.854 siswa (31 % dari jumlah penduduk). Rendahnya jumlah penduduk yang berpendidikan ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, misalnya gedung sekolah dan kurang meratanya penyebaran tenaga pengajar. Disisi lain masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan adalah barang mewah yang susahdibeli padahal wajib dimiliki, karena pendapatan per kapita yang masih rendah, yaitu 817 Dollar AS/tahun.

Tabel
Jumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 dan 2010

No	Jenis	Sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		2010	2011
1	TK	552	724
2	SD Negri	504	488
3	SD Swasta	67	70
4	SMP Negri	46	46
5	SMP Swasta	999	101
6	SMA Negri	12	12
7	SMA Swasta	39	45
8	SMK Negri	4	5
9	SMK Swasta	60	61
	Jumlah	**1.383**	**1.552**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2011.

1.1.1.3 Aspek Kesehatan

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan sarana dan prasarana medis yangprofesional merupakan salahsatu indikator kesehatan penduduk. Pada tahun 2010, konsentrasi dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo lebih intens pada pelayanan yang maksimal, yaitu penyebaran tenaga kesehatan. Hal ini dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang tersediatidak mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
tahun 2009 dan 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jenis	Tahun	
		2009	2010
1	Rumah Sakit Pemerintah	1	1
2	Rumah Sakit ABRI	2	2
3	Rumah Sakit Swasta	17	17
4	Puskesmas	26	26
5	Puskesmas Pembantu	55	56
6	Puskesmas Keliling	45	45
7	Balai Pengobatan	47	47
8	Rumah Bersalin	9	9
9	Apotek	232	232
10	Laboratorium	15	15
	Jumlah	**449**	**450**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2011

Kualitas sumber daya manusia juga berkaitan erat dengan tingkatan kesehatan penduduk. Jika sakit-sakitan, berbagai program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

1.1.1.4 Aspek Keagamaan

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang multi agama, didalamnya terdapat beranekaragam agama. Akan tetapi mayoritas penduduknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam. Komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan yang dianut adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel
Komposisi Pemeluk Agama di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009-2010

No	Agama	Tahun	
		2009	2010
1	Islam	1.590.908	1.680.501
2	Katholik	19.459	19.870
3	Kristen	50.098	35.811
4	Hindu	3.231	3.958
5	Budha	2.339	3.775
6	Konghucu	Data tidak tersedia	232

Sumber : Kabupeten Sidoarjo dalam angka 2011

Dengan kondidi kehidupan beragama yang beranekaragam tersebut, ternyata tidak menyebabkan Kabupaten Sidoarjo mengalami perselisihan. Hal itu masyarakat justru membuat masyarakat lebih hidup dalam keadaan yang harmonis dan penuh toleransi. Dalam kehidupan beragama tentunya juga membutuhkan fasilitas keagamaan sebagai sarana penunjang kegiatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berikut adalah tabel jumlah tempat ibadah yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2010.

Tabel
Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 dan 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Tempat Peribadatan	Tahun	
		2009	2010
1	Masjid	933	1.017
2	Langgar	4.114	4.325
3	Gereja	72	78
4	Pura	5	3
5	Wihara	2	1
6	Klenteng	Data didak tersedia	2

Sumber : Kabupaten Sidoarjo dalam angka 2011

Sesuai dengan jumlah pemeluk terbanyak adalah Muslim. Maka masjid dan langgar merupakan tempat ibadah yang paling banya di jumpai di Kabupaten Sidoarjo. jumlah kedua adalah gereja. Tempat ibadah bagi pemeluk agama tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, akan tetapi tempat ibadah juga bisa digunakan sebagaikegiatan keagamaan lainnya seperti untuk memperingati kegiatan hari besar agama masing-masing.

4.1.2 Gambaran Umum Lumpur Lapindo

4.1.2.1 Peruntuhan Wilayah

Sejak krisis ekonomi 1997, turunnya Soeharto Mei 1998, dan mulainya era Reformasi telah mengubah iklim politik di Indonesia secara drastis. Di sektor pertambangan, Pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang sulit ketika terpaksa mengubah regulasi tentang minyak bumi dan pertambangan mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panduan-panduan dari *International Monetary Fund* (IMF). Dengan ditandatanganinya Undang -Undang Minyak dan Gas Bumi pada 2001, persaingan bebas industri minyak bumi dan mineral dimulai. Undang -undang ini membuka kesempatan bagi sektor swasta baik domestik maupun internasional untuk beroperasi di Indonesia, tanpa ada intervensi apapun dari pemerintah. UU sebelumnya mengatur bahwa pemerintah, melalui Pertamina, sebagai pihak yang berhak mengelola industri tambang demi kepentingan mensejahterakan rakyat. Perusahaan swasta waktu itu harus menandatangani perjanjian karya dengan Pertamina jika ingin melakukan kegiatan eksplorasi migas di wilayah Indonesia.

Akibatnya, selama hampir separuh abad, Pertamina mendominasi industri minyak dan gas alam di Indonesia. Lahirnya UU baru meruntuhkan dominasi Pertamina. Pertamina, seperti layaknya perusahaan pertambangan yang lain, harus saling berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan swasta domestik dan multinasional. Inilah latar belakang masuknya keluarga Bakrie dalam bisnis tambang. Jawa Timur memiliki cukup banyak titik eksplorasi migas yang dikelola oleh berbagai perusahaan domestik maupun asing seperti Energi Mega Persada (keluarga Bakrie), Meta Epsi *Drilling Company* (kelompok Arifin Panigoro), *Exxon Mobile* (AS), Santos (Australia) dan Petronas (Malaysia). Blok Brantas, yang melingkupi wilayah Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan, merupakan salah satu lokasi eksplorasi migas. Pada awal 1990 an, PT Huffco Brantas, perusahaan Amerika, memiliki kontrak perjanjian karya di blok Brantas.

Pada pertengahan 1990an, Huffco menjual kontrak itu ke Lapindo Brantas *Incorporated*. Di tahun 2004, Energi Mega Persada (EMP) dan Novus Brantas (

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

British Petroleum) mengambil alih Lapindo. Pada tahun 2005, Novus Brantas menjual sahamnya ke Meta Epsi *Drilling Company* (Medco) dan Santos. Jadi komposisi kepemilikan Lapindo Brantas Inc. ketika lumpur mulai menyembur adalah: EMP (50 persen), Medco (32 persen) dan Santos (12 persen). EMP merupakan salah satu anak perusahaan *Bakrie & Brothers*, menjelaskan keterlibatan Bakrie dalam eksplorasi migas di Sidoarjo.

4.1.2.2 Profil Perusahaan Eksplorasi Migas (PT Lapindo Brantas) Sidoarjo

Lapindo Brantas adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Dikarenakan memiliki nilai saham terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator. PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan (Grup Bakrie). Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18%. "Chief Executive Officer" (CEO) Lapindo Brantas Inc. adalah (Nirwan Bakrie) yang merupakan adik kandung dari pengusaha dan (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia) pada Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Aburizal Bakri. Penjualan Saham Pada 20 September, PT Energi Mega Persada Tbk (PT EMP) berencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual Lapindo Brantas Inc ke Lyte Limited, perusahaan yang berafiliasi ke Kelompok Usaha Bakri. Akan tetapi penjualan ini tidak disetujui oleh (Badan Pengawas Pasar Modal) dengan alasan manajemen Energi belum bisa memberi penjelasan apa penyebab insiden lumpur panas dan pihak mana yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu, PT EMP mengalihkan rencana penjualan Lapindo Brantas ke pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie sehingga tidak perlu meminta persetujuan (rapat umum pemegang saham), karena bukan benturan kepentingan, sebagaimana yang terjadi dengan penjualan kepada Lyte. Pada 14 November 2006, kepemilikan saham EMP di Lapindo akhirnya dijual kepada Freehold Group Limite d, sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Kepulauan Virgin Britania Raya, namun penjualan ini lalu dibatalkan Freehold pada28 November 2006.

4.1.2.3 Lokasi semburan lumpur panas lapindo

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Gempol, Pasuruan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan.Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui.Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboran, walaupun pendapat tersebut ketika dipraktikan tidak dapat menghentikan luapan lumpur tersebut. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Jalan Tol Surabaya-Gempol, Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi,Indonesia

4.1.2.4 Penyebab Semburan Lumpur Panas

Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US$ 24 juta.Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang(selubung bor) ("casing ") yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengantisipasi potensi "circulation loss" (hilangnya lumpur dalam formasi) dan "kick" (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya.Alhasil, mereka merencanakan memasang "casing" setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak mencasing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpurnya Lapindo,Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik) sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan.Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar .Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkap "Blow Out Preventer (BOP)" di rig segera ditutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

& segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan.

Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara "open-hole" dengan selubung di permukaan 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil & kemungkinan banyak terdapat rekahan alami ("natural fissures") yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumurPerlu diketahui bahwa untuk operasi sebuah kegiatan pemboran MIGAS di Indonesia setiap tindakan harus seijin BP MIGAS, semua dokumen terutama tentang pemasangan casing sudah disetujui oleh BP MIGAS.

1.2 Penyajian Data

1.2.1 Dinamika konflik yang muncul dalam penyelesaian kasus korban lumpur lapindo di Desa Besuki

Semburan lumpur Lapindo di sekitar wilayah pemukiman di daerah Porong dan sekitarnya pada tahun 2006 lalu, tak kunjung terselesaikan, ribuan warga tak tentu nasibnya. Problem bencana luapan lumpur Lapindo di Desa Besuki kabupaten Sidoarjo, memakan korban ribuan rumah penduduk, puluhan pabrik, dan sarana sosial yang lain terendam lumpur, keresahan-keresahan mulai menghinggapi benak masyarakat setempat dan persoalan pun menjadi semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, tidak hanya menyangkut persoalan menghentikan semburan lumpur, akan tetapi bertambah menjadi persoalan hilangnya tatanan sosial-ekonomi-budaya masyarakat korban lumpur.

4.2.1.1 Konflik Penyebab Semburan

Adanya semburan lumpur Sidoarjo mengakibatkan rusaknya infrastruktur yang ada pada wilayah sekitar semburan bahkan mengakibatkan rusaknya pemukiman warga, industri serta lingkungan sekitar. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan sosial-ekonomi sekitar lokasi semburan. Ketidakstabilan lingkungan sekitar wilayah semburan menyebabkan munculnya konflik yang ditimbulkan. Baik konflik vertikal maupun konflik horisontal. Konflik ini bermula dari sikap warga sebagai korban yang merasa dirugikan akibat adanya semburan lumpur. Kerugian materil maupun immateril di derita oleh warga yang berada pada sekitar kawasan lumpur. Belum lagi adanya polusi udara berupa bau menyengat yang memiliki dampak bagi kestabilan kondisi kesehatan masyarakat.

Berangkat dari ketidakstabilan yang muncul ini, mengakibatkan warga untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang paling bertanggungjawab atas adanya semburan yang muncul pada tempat tinggal mereka, mereka menilai pihak yang paling bertanggungjawab dalam terjadinya semburan ini adalah PT. Lapindo Brantas. Karena semburan lumpur yang menggenangi wilayah mereka saat ini berawal dari pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas pada salah satu sumur yang berada disekitar semburan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Semburan lumpur lapindo yang terjadi ini berawal dari pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo pada salah satu sumur yang berada didekat lokasi semburan, seandainya PT. Lapindo tidak melakukan pengeboran pasti tidak begini keadaannya, saudara tercerai-berai, hubungan antar desa juga tidak harmonis, semuanya berusaha menuntut haknya masing-masing walau terkadang ego selalu dimenangkan."[1]

"Semua orang juga sudah tau dek kalo kejadian ini disebabkan oleh Lapindo yang seenaknya saja melakukan pengeboran di lingkungan penduduk banyak kayak begini, bila saja mereka melakukan pengeboran tidak di pemukiman kayak gini efek yang ditimbulkan pastinya tidak seperti ini, tapi kalo dipikir-pikir nggak lapindo saja yang salah kalo saja pemerintah tidak memberikan izin pasti mereka juga nggak bakal melakukan pengeboran. Nggak taulah pusing kalo ditanya siapa yang salah, semuanya sudah kayak lingkaran yang nggak bakal ada ujungnya."[2]

Dengan demikian, luapan lumpur panas Lapindo berawal dari adanya pengeboran disekitar wilayah semburan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Namun, PT. Lapindo Brantas bukan merupakan satu-satunya pihak yang patut disalahkan. Pemerintah selaku pemberi ijin pelaksanaan pengeboran juga memiliki andil besar dengan adanya Luapan lumpur panas. Jika pemerintah lebih cermat dalam memandang situasi lokasi izin pengeboran yang berada pada kawasan pemukiman penduduk yang rawan dengan segala resiko. PT. Lapindo Brantas selaku *corporate* yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dan dianggap melakukan kesalahan dalam melakukan prosedur eksplorasi mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan prosedur dengan benar sesuai dengan. Sesuai dengan pernyataan tertulis dari Wakil Presiden PT. Lapindo Brantas Bidang General Affairs Yuniwati Teryana yang menyatakan:

"Sesuai dengan program pengeboran yang disetujui, pipa $9^{5/8}$ inci akan dipasang 15-20 kaki (4,6-6 meter) di dalam formasi kunjung, sekitar 8.500

[1]Mukhlisuddin, Warga Besuki, *Wawancara,* 9 juli 2013.
[2]Arief Samsudin, Warga Besuki, *Wawancara,* 9 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaki, namun dari interpretasi seismik diduga formasi kunjung terletak pada kedalaman 2.682 meter. Hingga 2.804 meter tetap belum ketemu hingga diputuskan terus mengebor 2865 meter dengan mempertimbangkan *kick tolerance* pengeboran maksimum. Namun pada 2.833 meter telah terjadi *loss*.[3]

Konflik tidak hanya terjadi antar masyarakat dan PT. Lapindo Brantas. Namun pada tingkatan pemerintahan juga menuai konflik akibat adanya semburan lumpur panas yang menuai banyak aksi. Hal ini nampak pada rapat dengar pendapat komisi VII DPR dengan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. rapat dengar pendapat sejak awal diarahkan pada satu kesimpulan bahwa yang terjadi di Sidoarjo adalah bencana Nasional. Agusman Efendi bahkan sudah membacakan draf kesimpulan awal yang menyebut-nyebut "bencana nasional". [4] Tarik-menarik antara pro Kontra putusan Lumpur Sidoarjo sebagai Bencana Nasional. Banyak menuai protes antar kalangan anggota dewan yang menganggap bahwa putusan tersebut kurang tepat dan menguntungkan pihak PT. Lapindo Brantas sebagai aktor yang berperan besar dalam terjadinya semburan.

1.2.1.2 Konflik Pembayaran Ganti Rugi Warga Desa Besuki

Semburan lumpur panas Sidoarjo yang merendam ribuan pemukiman penduduk, lahan pertanian serta puluhan pabrik menimbulkan efek domino bagi kondisi kehidupan masyarakat sekitar lokasi semburan.

[3]Epilog Emha Ainun Nadjib,*Banjir Lumpur Banjir Janji; Gugatan Masyarakat Dalam Kasus Lumpur*,(Jakarta: Kompas, 2007)hal, 16-17.
[4]Ibid. 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakstabilan kondisi sosial, ekonomi warga mengakibatkan ketidakstabilan keadaan bermasyarakat pada wilayah sekitar. Yang berujung akan adanya konflik antar masyarakat. Sebagaimana Lewis A. Coser menyatakan konflik adalah perselisihan atau pertentangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang tidak mencukupi persediaannya. Dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh apa yang diinginkan tapi sekaligus memojokkan dan merugikan lawan mereka. Ketidakstabilan kondisi ekonomi sebagai sumber kekayaan mayarakat yang dianggap tidak mencukupi. Membuat konflik antar warga tidak dapat terhindarkan. Demikian pula warga desa Besuki yang merupakan salah satu desa yang juga terendam oleh lumpur juga menuntut adanya ganti rugi. Akibat terendamnya wilayah mereka.

Pada Perpres nomor 14 tahun 2007 Presiden menyatakan bahwa empat desa yakni desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo merupakan area yang termasuk ke dalam peta terdampak. Sehinggan memperoleh ganti rugi berupa PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan pembayaran bertahap sebanyak 20% dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebelum masa kontrak rumah 2 tahun habis. Memperoleh uang kontrak rumah sebesar lima juta rupiah dan uang jatah hidup sebesar tiga ratus ribu rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tidak masuknya Desa Besuki dalam wilayah terdampak yang nota benenya desa Besuki rawan akan terkena luberan dari lumpur oleh karena itu, pada hari kamis 20 juli 2006 pukul 08.00 wib. Sekitar 300 orang warga Desa Besuki melakukan unjuk rasa di Balai Desa Besuki. Meminta perkuatan dan peninggian Tanggul di perbatasan Mindi dan Besuki dan menolak perluasan pond.[5] Aksi dilanjutkan kembali pada tanggal 15-16 agustus 2006 dimana warga Besuki menuntut penghentian operasional mesin diesel yang menyedot air sungai brantas karena mereka menganggap akibat air tersebut dapat memicu melubernya lumpur ke wilayah mereka. Menuntut agar tanggul tersebut dijebol. Terjadi bentrok antar warga Desa Besuki dan Renokenongo namun dapat diatasi.[6] Selanjutnya pada hari kamis 17 agustus 2006 warga Besuki kembali melakukan aksi dengan menduduki pond penampungan di Desa Besuki. Mereka menuntut penguatan tanggul pond dan meninggikannya agar rembesan tidak menggenangi pemukiman mereka.[7] Tidak sampai disitu warga Besuki juga melakukan unjuk rasa agar Kaur Keuangan Suriyadi agar meundur karena dinilai tidak aspiratif terhadap nasib warganya yang terkena dampak luapan lumpur. Didalam hampir setiap proses politik selalu berlangsung konflik antara pihak-pihak yang berupaya mendapatkan dan mempertahankan sumber yang dipandang penting dan pihak-pihak lain yang juga berusaha mempertahankan sumber-sumber tersebut dengan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Hal inilah

[5]Makalah BPLS.hal 3.
[6]Ibid, hal, 4.
[7]Ibid,hal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian menjadikan konflik antar desa tak terhindarkan dalam kasus lumpur lapindo dimana warga desa Besuki dan Pejarakan berunjuk rasa dan berusaha menjaga desanya dari upaya desa lain yang ingin menjebol tanggul.

"Kondisi pada saat baru terkena lumpur waktu itu memang sangat kacau, amarah cepat sekali tersulut, belum lagi orang-orang jadi sangat sensitif dan berhati-hati, serangan dari warga desa lain kepada tanggul di wilayah kami kerap kali membuat kita takut, belum lagi menghadapi sikap iri dari desa lain."[8]

Tidak masuknya desa Besuki dalam perpres no 14 tahun 2007 mengakibatkan desa ini waspada akan segala kemungkinan yang ada karena resiko ganti-rugi seperti empat wilayah yang terkena peta terdampak tidak mungkin mereka dapatkan, sehingga telinga, dan mata senantiasa waspada akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan perusakan yang akan dilakukan oleh desa lain terhadap tanggul di Desa Besuki sehingga potensi jebolnya tanggul dapat mengancam kehidupan mereka.

"Putusan bapak Presiden dengan tidak menjadikan desa saya sebagai wilayah yang tak termasuk dalam peta terdampak seringkali membawa kecemasan pada kami waktu itu, tidur nggak nyenyak selalu waspada akan rubuhnya tanggul sehingga menimpa desa kami membuat kami khawatir, karena jika hal itu terjadi kami pun tak akan mendapatkan ganti rugi. Sehingga mau tidak mau kami juga harus antisipasi diri sendiri, belum lagi warga desa yang iri terhadap kami yang tidak terkena luberan lumpur."[9]

Diam dan pasrah tentu saja bukan merupakan karakteristik masyarakat Besuki, masyarakat besuki mempunyai kepentingan untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Tidak senantiasa

[8]Mukhlisuddin, Warga Besuki, *Wawancara,* 9 juli 2013.
[9]Arief Samsudin, Warga Besuki, *Wawancara,* 9 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khawatir akan bencana yang menimpa mereka. Sehingga tindakan untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan antara lain berupaya mengaspirasikan penolakan mereka akan adanya keppres no 14 tahun 2007 yang tidak memasukkan desa mereka kedalam wilayah terdampak sehingga mereka melakukan unjuk rasa di Tanggul di KM 39 dengan beberapa tuntutan antara lain:

a. Meminta kepastian pemerintah melalui BPLS agar desa Besuki masuk dalam area peta terdampak
b. Kompensasi gagal-panen
c. Ganti rugi uang evakuasi.[10]

Unjuk rasa selanjutnya dilakukan di Eks Tol KM 39 untuk menagih janji Lapindo tentang kompensasi gagal panen sebesar 7.200.000,-/KK dan biaya evakuasi 500,000,-/KK.Sebelum mencapai kesepakatan antar pihak warga Besuki dan pihak pemerintah dan Lapindo warga Besuki senantiasa melakukan aski untuk memperoleh apa yang mereka harapkan. Tak terhitung berapa kali mereka melakukan aksi agar mencapai harapan warga Besuki. Sehingga pada akhirnya pemerintah melalui Perpres 48 tahun 2008 merealisasikan keinginan warga Besuki dengan memasukkan desa Besuki dalam kawasan yang memperoleh dampak sosial kemasyarakatan di luar peta terdampak.

"Tak terhitung berapa kali kita melakukan demo, selama tuntutan kita tidak dipenuhi kami akan terus melakukan aksi, memperjuangkan hak kami. Hingga akhirnya pemerintah mau memenuhi tuntutan kami, kami bisa sedikit lega. Namun permasalahan ganti-rugi tidak berhenti sampai

[10]Makalah *BPLS* jilid II, hal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disitu karena sampai saat ini kita belum mendapat pelunasan dari apa yang kami miliki."[11]

Dengan demikian, permasalahan penyelesaian ganti-rugi yang dilakukan sesuai dengan perpres nomor 48 tahun 2008 belum juga ada kejelasan terkait dengan pelunasan uang ganti rugi. Ganti rugi sebesar 80% yang dijanjikan akan dibayarkan sebelum dua tahun masa kontrak belum juga bisa didapatkan. Sehingga aksi kembali terjadi untuk segera mendapatkan sisa pembayaran ganti rugi.

"Jarak desa Besuki dengan tanggul lumpur hanya berjarak sekitar 200 meter, rumah disini sudah tidak layak huni, air sumur sudah bercampur dengan minyak, oleh karena itu kami tidak pernah berhenti unjuk rasa sampai akhirnya sisa pembayaran ganti rugi kami dapatkan."[12]

Ganti rugi akibat semburan lumpur pada tahun 2006 lalu, sampai saat ini masih saja menyisakan persoalan dalam tahap pelunasan sehingga memunculkan kembali polemik antara warga desa Besuki, PT. Lapindo Brantas dan juga pemerintah pusat.

1.2.1.3 Aksi Penolakan Warga Besuki

Dalam proses penyelesaian masalah yang diakibatkan adanya semburan lumpur Lapindo menuai banyak tanggapan. Prokontra tentang penyelesaian problem sering terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara PT. Lapindo Brantas dengan korban luapan lumpur.Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas untuk mencegah

[11]Arief Samsudin, Warga Besuki, *Wawancara,* 9 Juli 2013.

[12]Rozi, Warga Besuki, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meluasnya wilayah luapan lumpur adalah adanya penyedotan air dari sungai porong yang digunakan untuk mendorong pipa snabbing. Namun warga desa Besuki menolak karena dapat membahayakan wilayah desa mereka.[13]

Penolakan warga kembali terjadi dengan adanya aktivitas operasional mesin deisel yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dan warga desa menuntut untuk penghentian mesin diesel oleh pihak Lapindo Brantas yang rencananya akan digunakan untuk pengeboran miring.Aksi penolakan oleh warga Besuki, dilakukan untuk memperoleh hak mereka dan mendapatkan kehidupan yang selayaknya mereka miliki. Salah satu aksi yang paling sering mereka lakukan adalah aksi untuk mendapatkan ganti rugi yang seharusnya sudah mereka dapatkan. Pihak pemerintah dan PT. Lapindo Brantas dalam Perpres No 48 tahun 2008 menyatakan bahwa proses ganti rugi akan diberikan sebesar 20 % dengan sisa pembayaran 80% diberikan selambat-lambatnya 2 tahun. Namun pada realitanya sisa pembayaran 80% yang semestinya sudah dibayarkan pada 2010 lalu sampai saat ini belum terealisasi. Hingga membuat warga Besuki terus-menerus mengingatkan akan tanggung jawab dari pemerintah dan PT Lapindo Brantas dengan cara melakukan aksi atau unjuk rasa.

> "Kami akan terus berunjuk rasa jika sisa ganti rugi belum juga diberikan oleh pihak PT. Lapindo Brantas atau pemerintah, yang mana saja pokoknya ganti rugi harusnya sudah kami dapatkan."[14]

[13]Makalah BPLS jilid I, hal 3.
[14]Arief Samsudin, Warga Besuki, *Wawancara,* 9 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjuangan warga untuk mendapatkan ganti rugi tidak semudah membalikkan telapak tangan tetapi melalui proses panjang dan berliku. Dimana pada awalnya warga desa besuki memolak menerima 20 % dengan sisa 80% dicicil sampai batas 2 tahun setelah masa kontrak habis. Warga desa Besuki mengingikan untuk memperoleh ganti rugi dengan *cash* (tunai) sehingga mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli tempat tinggal yang baru.

1.2.1.4 Peran dan Pemanfaatan Situasi Oleh LSM

Semburan lumpur lapindo yang memberikan efek besar bagi pranata sosial, ekonomi, budaya. Mengakibatkan tergeraknya sejumlah LSM atau *Non Goverment Organisation* tergerak untuk melakukan pendampingan terhadap korban lumpur. Pendampingan yang dilakukan LSM dalam menangani pelaksanaan korban lumpur Sidoarjo tidak hanya sebatas melakukan *advokasi* terhadap korban lumpur, melainkan sampai pada mempengaruhi serta memantau realisasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat korban lumpur. Karena fungsinya dalam proses mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. LSM termasuk kedalam kelompok kepentingan, karena kelompok kepentingan merupakan organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan publik.[15]bagaimanapun juga setiap kelompok pastinya akan selalu berhimpit dengan apa yang disebut sebagai kepentingan. Secara sederhana

[15] Mochtar Mas'oed (ed) dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik,* (Yogyakarka:, 1978),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan bahwa tak ada kelompok tanpa kepentingan walaupun perlu diingat pula bahwa bila kepentingan tersebut jumlahnya tidak terbatas sepertinya sangat mustahil sebuah kelompok mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan tersebut.[16] Sebagaimana dalam kasus lumpur lapindo, banyak LSM yang mulai mendekat dengan beragam kepentingan. Konflik antar LSM pun seringkali terjadi sebagaimana pada hari selasa, 3 oktober 2006 sekitar kurang lebih 20 orang dari LSM SWAPPAL (Swadaya Warga Pengawas dan Pengamanan Aliran Lumpur) menolak kehadiran WALHI. Dengan mengajukan tiga tuntutan yakni; selamatkan manusia bukan ikan, buang lumpur ke laut dan meminta untuk tidak menenggelamkan desa mereka.[17] Dalam dinamika kelompok, apalagi yang berkaitan dengan politik maka akan selalu terkait dengan apa yang disebut sebagai kepentingan, baik itu menyangkut hal-hal individu maupun yang dilandasi semangat kebersamaan kelompok sebagai entitas bersama yang memiliki tujuan-tujuan kelompok yang sepakat untuk diperjuangkan dan direalisasikan.

Demikian juga dengan LSM SWAPPAL dan WALHI memiliki kepentingan yang berbeda dimana LSM SWAPPAL menginginkan pembuangan lumpur dialirkan ke laut sehingga tidak merendam desa sedangkan WALHI berusaha untuk menyelamatkan ekosistem yang ada sehingga menolak mengalirkan lumpur ke laut yang berakibat rusaknya kehidupan ekosistem air.

---

[16] Varma S.P, *Teori Politik Modern,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,1987), 226
[17] Malakah BPLS Jilid I, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Semburan lumpur itu membuat rusaknya ekosistem dan kami selaku penggiat masalah lingkungan sangat berkepentingan dalam hal ini, karena jika hal ini berlangsung secara terus-menerus akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi rusaknya lingkungan sekitar."[18]

Selain LSM SWAPPAL dan WALHI, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga melakukan hal yang sama , yakni melakukan advokasi untuk korban lapindo agar memperoleh hak-haknya kembali dengan layak. Usaha YLBHI dalam membantu korban diantaranya dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan pada pihak lapindo brantas agar mendapatkan jalan penyelesaian dengan tanpa mengindahkan korban. Hal ini terkait dengan pernyataan ketua YLBHI;

"Pemulihan hak-hak korban harus menjadi tujuan utama, ketimbang melakukan kompromi dan mencari jalan penyelesaian masalah yang meminggirkan korban."[19]

Perbedaan kepentingan dari masing-masing LSM menjadikan terpecahnya fokus permasalahan yang hendak diinginkan penyelesaiannya. Dan menjadikan makin banyaknya gerakan-gerakan yang dimunculkan akibat perbedaan kepentingan kelompok itu. Munculnya kelompok-kelompok baru dalam kasus lapindo ini antara lain: kelompok 4D yang memiliki kepentingan yakni agar wilayah empat desa. Mindi, Pejarakan, Kedung Cangring dan Besuki yang menginginkan wilayahnya masuk dalam wilayah peta terdampak dengan melakukan aksi-aksi yang kontraproduktif.

---

[18] Henri NurCahyo, WALHI Ekologi Budaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 juli 2013.
[19] AntaraNews, YLBHI: Penyelesaian Lapindo Harus Adil Bagi Korban, http://www.antaranews.com/print/1212076062/ylbhi-penyelesaian-lapindo-harus-adil-bagi-korban, Jum'at, 19 Juli 2013 , 9:22wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok selanjutnya adalah kelompok Paguyuban Masyarakat Pasar Kedungbendo menuntut agar ganti rugi tanah dan kios bangunan tidak disamakan dengan ganti rugi tanah dan bangunan perumaha, bantuan uang kontrak dan usaha baru serta dana UKM. Dan kelompok Gabungan Pengusaha Korban Luapan Lumpur (GPKLL) yang meminta ganti rugi dengan pihak lapindo melalui proses **B to B.** Dengan demikian semakin banyak kepentingan yang ada dalam suatu kelompok maka dengan sendirinya akan memunculkan kelompok-kelompok baru. Dengan demikian semaki besar pula kemunginan kelompok itu untuk menjadi alat untuk mencapai kepentingan pribadi paraa aktivis itu sendiri yang bertentangan dengan kepentingan kolektif.[20]

1.3 Pembahasan

1.3.1 Faktor Penyebab Konflik Lumpur Lapindo di Desa Besuki dan Upaya Penyelesaiannya

Konflik merupakan suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pertentangan-pertentangan ini bisa berbentuk non fisik yang kemudian dapat berkembang menuju benturan-benturan fisik.

4.3.1.1 Faktor Penyebab Konflik akibat Lumpur Lapindo Di Desa Besuki

Konflik yang terjadi antara warga desa Besuki dan pihak PT. Lapindo Brantas bermula ketika munculnya semburan lumpur panas di

[20] Keith R. Legg, *Tuan hamba dan Politisi,* (Jakarta:, 2000), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

area dekat pengeboran yang dilakukan PT. Lapindo Brantas yang jaraknya juga sangat dekat dengan pemukiman warga. Sehingga ketika terjadinya semburan lumpur panas dengan suhu sekitar 60% celcius dengan besaran 5000m^3 setiap harinya mengakibatkan banyak area pemukiman, dan sawah serta industi terendam oleh lumpur. Terkuburnya lahan serta area rumah warga mengakibatkan sejumlah warga desa Besuki cemas akan kelanjutan nasib desa serta kondisi rumahnya. Sehingga secara tidak langsung memunculkan pertentangan antar warga yang sudah terkena luberan lumpur dengan warga yang kemungkinan besar juga akan terkena luberan. Luberan lumpur panas Lapindo, mengakibatkan terjadinya konflik di berbagai desa dekat titik semburan. Termasuk desa Besuki sebagai wilayah yang dekat dengan lumpur lapindo. Bermula dari munculnya semburan lumpur panas, terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik di desa Besuki antara lain: kecemasan warga desa Besuki akan luberan lumpur ke lahan warga, tidak masuknya wilayah besuki dalam peta terdampak, proses ganti-rugi pasca Perpres 48 tahun 2008 yang tak kunjung usai.

4.3.1.1 Kecemasan Warga akan Luberan Lumpur ke Lahan Warga Desa Besuki

Salah satu faktor penyebab timbulnya konflik warga Besuki akibat adanya luapan lumpur bermula kecemasan warga akan masuknya luberan lumpur ke lahan warga desa Besuki. Aksi unjuk rasa kerap kali dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh warga desa Besuki sebagai cara agar pemerintah serta pihak PT. Lapindo Brantas mampu mencegah luberan lumpur panas memasuki desa mereka.Kecemasan warga semakin menjadi-jadi ketika tanggul penahan lumpur yang berada di wilayah sekitar desa Besuki rawan jebol. Sehingga aksi dilakukan oleh warga desa Besuki untuk meminta penguatan tanggul yang berfungsi mencegah ambrol serta lubernya lumpur ke lahan warga.

> "Tak terhitung berapa kali kami melakukan aksi guna menyuarakan pendapat kami, yang jelas dulu waktu baru-baru ada luapan lumpur kami melakukan aksi mendesak PT. Lapindo Brantas untuk menghentikan luapan lumpur karena sampai berbulan-bulan lumpur nggak bisa dihentikan, kami sebagai warga yang paling dekat dengan lokasi lumpur merasa khawatir akan nasib lingkungan, ancaman terkena luberan selalu berhasil membuat tidur nggak nyenyak, belum lagi ancaman dari desa lain yang mempunyai niat untuk menjebol tanggul, sejak adanya semburan lumpur biasanya antar desa rukun sekarang seringkali terjadi bentrok antar desa yang berusaha menyelamatkan desa masing-masing dari bencana."[21]

Dengan demikian, akibat adanya kecemasan antar warga desa akan adanya luberan lumpur yang bisa kapan saja memasuki wilayah desa mereka mengakibatkan ketegangan antar desa. termasuk desa Besuki yang merasa cemas akan jebolnya tanggul yang ada di wilayah mereka. Dan akan perusakan yang akan dilakukan oleh warga desa lain.

Konflik yang terjadi antar antar kelompok yang dalam hal ini antar desa bertujuan untuk memperebutkan hal yang sama, konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsensus). Dalam hal ini hal yang sama diperebutkan oleh warga desa Besuki dan desa-desa lain

[21] Rozi, Warga Besuki, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah keamanan dan kenyamanan tempat tinggal mereka. Sehingga untuk memperoleh itu semua setiap warga desa melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hal itu termasuk dengan melakukan unjuk rasa bahkan pertikaian antar desa.

4.3.1.2 Tidak Masuknya Desa Besuki Dalam Peta Terdampak.

Sebagai tanggung jawab pemerintah serta PT. Lapindo Brantas, melalui presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keputusannya yang selanjutnya diatur dalam Perpres no 14 Tahun 2007 menyatakan bahwa empat desak yakni Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo serta Kedungbendo masuk kedalam peta terdampak yang selanjutnya untuk memperoleh ganti rugi sebagai mana diatur dalam Perpres tersebut. Sedangkan desa Besuki yang notabenenya merupakan wilayah yang rawan akan luberan lumpur tidak dimasukkan oleh pemerintah kedalam peta terdampak. Sehingga jika luberan lumpur panas sampai kepada wilayah desa Besuki mereka harus mampu menangggung sendiri kerugian yang di derita. Mulai dari kewaspadaan akan luberan lumpur, tercemarnya kondisi air serta bau menyengat yang sangat mengganggu kesehatan tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab.

"Antisipasi harus kami lakukan demo minta tanggul ditinggikan juga diperkuat selalu kami lakukan dengan jumlah yang tak terhitung, demo itu kami lakukan ya biar lumpur nggak meluber ke wilayah kita, jika meluber dan menenggelamkan kita nggak ada yang bertanggungjawab siapa yang mau ngasih ganti rugi? Yang dapat ganti rugi kan Cuma empat desa itu pada waktu itu, padahal kondisi rumah dan lahan kami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat itu juga tidak layak huni, kalo terjadi apa-apa kan kita nggak dapat ganti rugi, demo minta dimasukkan kedalam wilayah terdampak juga sering kami lakukan makanya pada waktu 2008 itu akhirnya desa kita masuk juga pada wilayah terdampak. Setidaknya kita bisa sedikit lega."[22]

Tidak masuknya desa Besuki ke dalam peta terdampak mengakibatkan warga desa Besuki melakukan aksi menyuarakan aspirasi mereka akan kerugian yang mereka tanggung. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak mampu berbuat banyak, selain berupaya menyampaikan segala aspirasi warga desa Besuki sebagai korban luapan lumpur yang tidak masuk ke dalam wilayah peta terdampak kepada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pemerintah kabupaten Sidoarjo sendiri juga memperoleh imbas dari adanya luapan lumpur. Yang kemudian diatur dalam Perpres no 48 tahun 2008 dapat sedikit meredam gejolak yang terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh bapak H. Sungkono:

"Kami selaku pihak pemerintah hanya mampu membantu menyampaikan aspirasi dari korban luapan agar dimasukkannya wilayah mereka kedalam peta terdampak, mengingat dekatnya luapan lumpur dengan pemukiman warga desa Besuki. Juga ada bukti kerusakan yang sangat terlihat di pemukiman desa Besuki. Selain kerugian dampak sosial di wilayah tersebut juga sangat besar. Namun, pada waktu itu hanya itu yang bisa kami lakukan. karena konsentrasi kami tidak hanya ada pada korban saja. Melainkan juga pada dampak lain yang ditimbulkan dari adanya bencana itu, yakni perpindahan akses jalan dan menurunnya perekonomian wilayah Sidoarjo. Tapi alhamdulillah mbak akhirnya wilayah desa Besuki bisa masuk kedalam peta terdampak dalam perpres selanjutnya."[23]

---

[22] Arief Samsudin, Warga Besuki, *Wawancara,* 9 Juli 2013.

[23] Sungkono, Pansus Lapindo, Anggota DPRD F-PAN Komisi B, *Wawancara,* 12 Februari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya pihak Pemerintah, LSM selaku kelompok kepentingan juga berupaya memberikan pemahaman serta menjembatani antar warga selaku korban kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan agar adanya kesepakatan yang tidak merugikan pihak korban. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika keberpihakan pemerintah kepada pengusaha dalam hal ini PT. Lapindo Brantas, maka yang sangat dirugikan adalah warga. Sebagaimana dikatakan oleh Humas dari LSM SWAPPAL:

"Disini mbak, kami mencoba untuk menjembatani antar korban kepada pemerintah, hal ini perlu kita lakukan mengingat warga selaku korban tidak mengetahui bagaimana nasib mereka kedepan, dan bagaimana prosedur yang tepat. sehingga kami mencoba untuk mengarahkan mereka untuk mendatangi beberapa pihak yang bersangkutan dengan kasus lumpur ini. mengingat warga desa Besuki tidak masuk kedalam wilayah peta terdampak. padahal waktu itu kalo dilihat harusnya mereka juga berhak dimasukkan kedalam peta terdampak. karena Kondisi pemukiman warga Besuki sudah sangat rawan akan tangggul yang jebol."[24]

Adanya upaya pemerintah daerah dan LSM dalam menjembatani agar desa Besuki masuk kedalam wilayah peta terdampak. mampu sedikit meredam gejolak yang ditimbulkan akibat tidak masuknya desa Besuki ke dalam Peta terdampak. Sebagaimana pendekatan struktural-konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik.[25]

---

[24] Heru Tjokro, Humas LSM SWAPPAL, *Wawancara*, 15 Januari 2014.
[25] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1992), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian halnya dengan warga Besuki yang memiliki kepentingan yang sama yakni mempertahankan wilayah mereka. Sehingga memutuskan untuk melakukan aksi untuk memaksa pemerintah serta pihak PT. Lapindo Brantas juga bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi.

4.3.1.3 Proses Ganti Rugi Pasca Perpres 48 Tahun 2008 Yang Tidak Kunjung Usai

Penyebab konflik yang dilakukan oleh warga Besuki selanjutnya adalah tak kunjung usainya pembayaran ganti rugi yang dijanjikan akan selesai paling lambat dua tahun sebelum masa kontrak habis yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Proses ganti rugi pasca Perpres 48 tahun 2008 hingga saat ini, pelunasan 80% sisa pembayaran belum juga diberikan pihak Lapindo kepada warga Besuki. Sehingga aksi demonstrasi kembali dilakukan oleh warga desa Besuki agar selesainya proses ganti rugi dan warga desa Besuki bisa segera mencari tempat tinggal baru yang lebih layak dan aman untuk mereka tempati.

> "Demo akan terus kami lakukan jika kami belum mendapatkan pelunasan dari 80% yang dijanjikan, dan kami akan meninggalkan tempat ini jika sudah memperoleh pelunasan ganti rugi, sejauh masih belum ada kejelasan kami akan terus melakukan demo"[26]

Dengan demikian, warga desa Besuki akan menghentikan aksinya. Jika PT. Lapindo Brantas mampu menyelesaikan urusan ganti rugi sebanyak 80% dan warga desa Besuki akan dengan rela meninggalkan

[26] Rozi, Warga Besuki, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal mereka dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman, dan nyaman jika pelunasan ganti rugi sudah terealisasi. Sampai pada saat ini, proses ganti rugi terhadap korban yang berada pada wilayah peta terdampak belum juga selesai. Pemerintah dalam hal ini Pansus yang menangani masalah lumpur lapindo juga berusaha untuk mendesak pihak PT. Lapindo Brantas untuk segera menyelesaikan proses pembayaran ganti rugi kepada warga. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada pihak PT. Lapindo oleh Pansus Lumpur Lapindo. Sebagaimana diungkakan oleh H. Sungkono selaku anggota DPRD komisi B:

"Memang sampai saat ini proses ganti rugi belum juga selesai, kami juga sudah berupaya mendesak pihak PT. Lapindo Brantas untuk segera menyelesaikan ganti rugi. Pihak PT. Lapindo Brantas juga sudah kami panggil untuk kesini. Mereka menyanggupi untuk segera menyelesaikan proses ganti-rugi. Namun tidak dalam waktu dekat mengingat perusahaan mengalami *cashflow*."[27]

4.1.3.4 Konflik antara Pengusaha, Korban Lapindo, LSM dan Pemerintah

Seperti apa yang diutarakan oleh Lewis A.Coser konflik adalah perselisihan atau pertentangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang tidak mencukupi persediaannya. Dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh apa yang diinginkan tapi sekaligus memojokkan dan merugikan lawan mereka. Didalam hampir setiap proses politik selalu berlangsung konflik antara pihak-pihak yang

[27] Sungkono, Pansus Lapindo, Anggota DPRD F-PAN Komisi B, *Wawancara,* 12 Februari 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang dipandang penting dan pihak-pihak lain yang juga berikhtiar mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber tersebut. Dalam proses politik berbagai kelompok dan individu dengan menggunakan sarana kekuasaan yang dimiliki berupaya keras memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Konflik yang terjadi antar kelompok atau antar individu untuk memperebutkan hal yang sama, konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsensus). Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasikan secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. Sebagaimana konflik yang terjadi antara Pengusaha, LSM serta korban Lumpur Lapindo bermula dari adanya upaya masyarakat dalam mempertahankan dan memperoleh kembali apa yang dimiliki yang kemudian dirusak oleh pihak pengusaha akibat kesalahan eksploitasi sumber daya yang berada di wilayah sekitar, sementara pemerintah sebagai pembuat kebijakan belum dapat secara tegas memaksa pihak pengusaha dalam hal ini PT. Lapindo akan kejelasan ganti rugi masyarakat korban terdampak. Konflik politik disebabkan oleh dua hal yaitu:

4.3.1.3.1 Konflik politik kemajemukan horisontal

Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural , seperti suku bangsa, daerah, agama dan adat istiadat. Kemajemukan horisontal ini dapat menimbulkan konflik, karena masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing unsur kultur mempunyai pandangan, budaya yang berbeda-beda, masing-masing kultur berupaya untuk mempertahankan identitas dan karakteristik budaya mereka. Sebagaimana konflik yang terjadi antar masyarakat korban lapindo masing-masing berusaha untuk mempertahankan wilayah mereka dan berupaya dengan keras agar memperoleh ganti rugi akan kerusakan lahan warga sehingga konflik antar desa juga terjadi. Sebagaimana Arief samsudin mengatakan:

> "Awal terjadinya semburan itu, tentunya warga merasa sangat panik. Takut kalo lumpur panas suatu saat akan meluber, karena lokasi tempat tinggal saya dekat dengan tanggul penampungan lumpur, maka ketakutan itu semakin besar. Takut tanggul jebol dan meredam rumah lagi. Sudah gitu kita harus berhadapan dengan desa lain yang juga mengancam akan menjebol tanggul. Kalau tanggul jebol maka rumah kita juga ikut *kelem*. Nah nek wes kayak gitu siapa yang mau diminta ganti rugi. Maka dari itu tiap malam biasanya kita warga besuki juga jaga-jaga supaya gak ada lagi yang berusaha njebol tanggul."[28]

Dengan adanya luberan lumpur panas yang terjadi konflik antar warga desa yang berupaya mempertahankan wilayah masing-masing juga tidak bisa terelakkan lagi. Serta kepanikan akan kehilangan tempat tinggal dan lingkungan mengakibatkan konflik dengan pihak lapindo juga tidak bisa dihindari. Disisi lain warga berupaya meminta ganti rugi sementara pihak PT. Lapindo sebagai pengusaha berupaya

[28] Arief samsudin, warga Desa Besuki, *wawancara,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk lepas dari tanggung jawab akibat kerusakan karena pihak PT Lapindo mengatakan bahwa semburan lumpur merupakan bencana bukan karena kesalahan dari pihak Lapindo semata. Sedangkan LSM berupaya untuk mengadvokasi masyarakat sesuai dengan AD/ART dari LSM tersebut. WALHI selaku LSM dalam kasus Lumpur lapindo berkepentingan agar ekosistem air tidak risak akibat adanya aliran lumpur ke arah sungai.

4.3.1.3.2 Konflik Politik kemajemukan vertikal

Struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal ini dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang memiliki sedikit keekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Warga korban lumpur lapindo sebagai pihak yang masuk kedalam kategori sedikit memiliki sumber daya kekayaan, pengetahuan dan bahkan tidak memiliki kekuasaaan akan bertentangan dengan pihak PT. Lapindo brantas sebagai pemilik kekayaan pengetahuan dan sedikit kekuasaan. Sehingga keadaan ini memunculkan konflik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar kedua pihak yang terkena dampak luapan (warga) serta pihak yang menjadi pihak penyebab (PT Lapindo Brantas). Pemerintah selaku pihak pemegang kekuasaan dan juga wakil dari masyarakat berupaya mendorong proses percepatan ganti rugi kepada masyarakat agar permasalahan tidak menjadi semakin berlarut-larut. sebagaimana dikatakan bapak Sungkono:

> "Kami sudah berupaya maksimal untuk memperoleh ganti rugi warga kepada pihak PT. Lapindo Brantas. kapan hari saya juga sudah mensosialisasilkan kepada warga. dan kita juga sudah mencoba untuk meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan perpres baru mengenai teknis pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur. sejujurnya disini tidak hanya warga saja yang mengalami kerugian, karena pihak pemerintah daerah pun juga memperoleh dampak yang cukup besar dengan adanya luapan lumpur itu. seperti yang bisa mbak lihat lumpur sangat dekat dengan akses jalan penghubung antara Surabaya dan Sidoarjo (Pasuruan dan Malang dan beberapa kota lainnya). Belum lagi dengan banyaknya usaha yang gulung tikar akibat adanya semburan lumpur itu. jadi pada waktu itu konsen kita tidak hanya pada korban lumpur saja, salah satunya pemecahan solusi cepat untuk akses jalan juga sangat mendesak pada waktu itu."[29]

Demikian pula LSM selaku kontrol dari pemerintah berupaya untuk mendapatkan jalan tengah akibat problem yang terjadi akibat adanya semburan dengan memperjuangkan kepentingan masing-masing LSM dan kelompok masyarakat. Dengan demikian tarik-menarik kepentingan antar Pengusaha dan Masyarakat yang tidak

[29] Sungkono, Pansus Lapindo, Anggota DPRD F-PAN Komisi B, *Wawancara,* 12 Februari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau rugi serta LSM yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan secara immaterial dan juga pemerintah yang berupaya melakukan hal terbaik dalam proses perolehan ganti rugi pada masyarakat serta pengusaha senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat sekitar semburan.

4.3.2 Upaya Penyelesaian Konflik

Agar konflik yang terjadi di desa Besuki akibat adanya semburan lumpur panas Lapindo dapat di redam dengan cara memenuhi tuntutan dari pihak warga Besuki. Menurut Ralf Dahrendorf bentuk pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka. Konflik warga Besuki dengan Lapindo bisa selesai jika, kedua pihak pihak pertama yakni PT. Lapindo Brantas serta pemerintah dan pihak kedua warga desa Besuki. Sama-sama menyadari situasi yang terjadi. Dimana kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi sehingga solusi dan kesepakatan akan penyelesaian konflik didapatkan. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi rapi, sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup-lingkup tuntutan pihak lain.Upaya penyelesaian konflik yang selanjutnya yakni; warga Besuki mengkooardinir apa yang menjadi tuntutan mereka, semisal apa-apa yang diinginkan sehingga pihak PT. Lapindo mampu memahami tuntutan dari pihak warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga untuk selanjutnya dapat direalisasikan tuntutan-tuntutan dari pihak warga. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan di antara mereka. Ketika kesepakan antar pihak pertama dan pihak kedua sudah disepakati, maka keduabelah pihak harus memegang aturan main yang sudah disepakati. Dalam hal ini ketika ganti rugi yang sudah dijanjikan oleh PT. Lapindo Brantas dan pemerintah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan pelunasan sebesar 80% tidak direalisasikan. Maka warga Besuki kembali bergejolak untuk mendapatkan ganti rugi yang belum dibayarkan setelah lama jatuh tempo berakhir. BPLS selaku perwakilan pemerintah yang sebagaimana diungkap dalam perpres no 14 tahun 2007 yang menangani masalah sosial kemasyarakatan. Berupaya mengakomodir aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan diteruskan di ke pemerintah dan pihak Lapindo Brantas. Ketika warga desa Besuki menuntut untuk peninggian tanggul dengan segera BPLS meninggikan tanggul tersebut sehingga aksi warga dapat diredam.[30] Pendekatan negosiasi dilakukan oleh pihak BPLS dan PT. Lapindo Brantas untukl meredam amarah warga Besuki. Pihak BPLS sebisa mungkin memenuhi tuntutan warga sehingga konflik yang terjadi bisa meredam.

[30] Makalah BPLS jilid I, hal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id